

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia informasi saat ini sangat bergantung pada teknologi. Proses komunikasi yang dahulu memakan waktu lama untuk disampaikan, penyebarluasan informasi tidak selancar dan secepat saat ini menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Penggunaan teknologi saat ini sangatlah mengaruhi keaktifan partisipasi masyarakat didalam segala kegiatan. Berbagai bentuk sarana teknologi berupa komputer, laptop, atau, *handphone* saat ini sangat dibutuhkan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat karena cara penggunaannya yang praktis dan efisien. Banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya teknologi, sehingga semua bentuk keperluan dan kebutuhan dapat teratasi. [1]Salah satu cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mengunjungi website. Melalui suatu website siapapun dapat mencari atau mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan serta dapat membantu dalam kegiatan komunikasi, mencari lowongan pekerjaan, hingga mengurus suatu administrasi tertentu[2].

Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan instansi pemerintahan berkedudukan ditingkat kabupaten dalam struktur komando Polri. Terdapat 12 kecamatan yang berada dibawah pengawasan Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, antara lain : Kecamatan Komodo, kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Boleng, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Welak, dan Kecamatan Ndosu. Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Kepolisian bertugas untuk memberikan perlindungan, pelayanan, serta pengayoman kepada Masyarakat. Dalam menjalankan tugas Kepolisian kepada Masyarakat, dibentuklah unit SPKT. Unit SPKT berfokus pada penerimaan

pengaduan dan pelayanan surat keterangan, seperti SKTLK, SIK, SP2HP dan beberapa dokumen penting lainnya[3].

Satu dari unit tugas Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang biasa disebut SPKT berhubungan langsung dengan pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu salah satunya seperti pelaporan saat terjadinya suatu kehilangan, pelaporan pengaduan keluhan atau saksi kriminalitas pada masyarakat, pelayanan pembuatan surat izin keramaian, dan sebagainya.[4] Segalah bentuk laporan terjadinya kehilangan, pengaduan keluhan atau kriminalitas, dan surat izin keramaian akan segera dicatat pada administrasi bagian SPKT. Penindaklanjutan atas laporan yang telah dibuat oleh masyarakat adalah suatu hal yang dikategorikan penting apabila sudah masuk keranah Polres. Proses melakukan pelaporan di Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur saat ini dilakukan dengan cara pelapor datang langsung ke lokasi bagian SPKT Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya pelapor mengisi segalah bentuk formulir administrasi laporan yang selanjutnya hasil dari laporan tersebut dapat diambil 3 hari terhitung sejak laporan dibuat.

Saat ini, prosedur yang berlaku mengharuskan masyarakat untuk datang langsung ke Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dapat menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari Polres. Dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses pelaporan. Masyarakat dapat melaporkan kejadian dengan cepat dan mudah melalui platform online, mengurangi kebutuhan akan kunjungan langsung ke Polres. Selain itu, aplikasi dapat membantu dalam manajemen administrasi yang lebih efektif, termasuk pengelolaan data, dan memberikan transparansi atas status laporan kepada masyarakat. Dengan demikian, penggunaan aplikasi dapat mempercepat penanganan pelaporan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dibuat suatu Aplikasi Rancang Bangun Sistem Administrasi Pelaporan Masyarakat pada Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berbasis website yang dapat membantu bagian unit SPKT Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Aplikasi ini dapat membantu bagian SPKT dalam penyimpanan dokumen atau pengarsipan agar lebih efektif serta dapat membantu memangkas tempat penyimpanan dokumen dalam waktu retensi. Sementara kemudahan untuk pelapor yaitu bisa melapor tanpah harus jauh-jauh ke Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi ini hanya berfokus pada pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) seperti : sertifikat tanah, ijazah, paspor, kartu ATM, KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran, Pelayanan Surat Izin Keramaian (SIK), dan Pelayanan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
2. Aplikasi yang dibangun berbasis website.
3. Aplikasi dapat digunakan oleh masyarakat umum dan pihak bagian SPKT Polres Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang diajukan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana membangun sistem administrasi pelaporan masyarakat pada Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode prototyping?
2. Bagaimana cara memastikan kelayakan semua fitur telah berjalan dengan baik?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian tugas akhir ini antara lain.

1. Menghasilkan sistem administrasi pelaporan masyarakat pada Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Melakukan pengujian untuk memastikan kelayakan semua fitur pada sistem.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu.

1. Membantu memudahkan pelapor dalam melakukan pelaporan dan dalam melakukan proses penindaklanjutan pelaporan yang dilakukan dapat lebih efisien.
2. Memudahkan untuk melakukan penyimpanan dan pengarsipan berkas-berkas pelaporan dan penindaklanjutan dalam masa retensi.